



KR-Antara/Oky Lukmansyah

MONITORING MINYAK GORENG: *Petugas Satgas Pangan memeriksa jeriken berisi minyak goreng saat melakukan monitoring di kantor distributor minyak goreng SGT, Desa Dampyak, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (22/2). Monitoring tersebut untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di distributor setempat sekaligus mencegah terjadinya penimbunan minyak yang menyebabkan kelangkaan di pasaran.*

SATGAS PANGAN CEK MINYAK GORENG

Pemda DIY Telusuri Penyebab Kelangkaan

YOGYA (KR) - Kelangkaan minyak goreng di pasaran sampai saat ini masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah, termasuk DIY. Dampak dari adanya kelangkaan minyak goreng tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena minyak goreng termasuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat maupun para pedagang makanan.

Menyikapi kondisi tersebut Pemda DIY masih menelusuri apa yang menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng di DIY tersebut. “Kelangkaan minyak goreng ini tidak hanya terjadi di DIY tapi sifatnya nasional. Terus terang sampai saat ini kami belum menemukan apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Karena ini secara nasional, stok minyak goreng menghilang. Maka tentu menjadi

tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencari akar persoalan itu, sehingga bisa segera dicarikan solusi terbaik,” kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (22/2).

Baskara Aji mengatakan, sejumlah upaya terus dilakukan Pemda DIY bersama stakeholders terkait untuk mencari solusi dari penyebab kelangkaan minyak goreng. Salah satunya de-

ngan meminta Satgas Pangan untuk mengecek kondisi di lapangan. Hasilnya, memang persediaan minyak di DIY terbilang langka. Namun, belum ditemukan adanya indikasi penimbunan. Tindakan itu dilakukan karena kelangkaan minyak goreng berdampak besar terhadap perekonomian di DIY termasuk sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Bahkan sektor UMKM yang saat ini paling merasakan dampaknya.

“Pelaku UMKM yang berusaha di bidang kuliner, cukup terdampak dengan adanya kelangkaan minyak goreng. Persoalannya bukan hanya karena harga, tapi juga karena kelangkaannya itu. Persoalan ini harus segera diselesaikan, bukan

hanya DIY tapi secara nasional,” ujar Sekda DIY.

Dikatakan, Pemda DIY mencoba fokus menggelar operasi pasar dan mengerahkan toko berjejer agar segera menambah stok minyak goreng. Karena mereka punya jaringan dari produksi sampai ke konsumen langsung melalui jaringan mereka. Walaupun untuk mengatasi kelangkaan tersebut sebetulnya tidak mudah. Mengingat kelangkaan minyak goreng tidak hanya terjadi di DIY, tapi secara nasional stok minyak goreng juga langka di pasaran.

“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional agar solusi atas masalah ini segera ketemu,” ujarnya. **(Ria)-f**

BPJS KESEHATAN JADI SYARAT DI ATR/BPN

Ali Ghufron: Layanan Lain Masih Dikaji

DENPASAR (KR) - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan memang menjadi syarat layanan pertanahan di Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai 1 Maret 2022, namun untuk syarat pelayanan bidang hukum seperti SIM, SKCK dan lainnya hingga keagamaan seperti umrah masih dalam pengkajian.

“Ini masih salah persepsi, ya, dan memang 1 Maret itu diterapkan untuk ATR/BPN untuk jual beli, dan itu umumnya pembeli. Selama prosesnya juga akan dievaluasi nanti. Sedangkan layanan yang lain itu belum (sebagai syarat BPJS Kesehatan). Untuk SIM misalnya saat 1 Maret kemarin, ya, tidak betul, tapi hanya untuk ATR/BPN,” kata Ali Ghufron Mukti saat ditemui di Denpasar,

Bali, Selasa (22/2).

Ali Ghufron mengatakan, untuk penggunaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan SIM, STNK, SKCK hingga program keagamaan seperti umrah masih dalam pembahasan dan butuh waktu. Saat ini tim baru dibentuk untuk mulai melaksanakan program tersebut, meninjau aturan perundang-undangannya sehingga membutuhkan waktu yang panjang.

“Layanan yang lain masih perlu waktu, nanti dari situ diterjemahkan dulu, lalu membentuk tim aksi dulu yang artinya melaksanakan, meninjau aturan perundang-undangannya, nanti dibikin, itu masih panjang,” katanya sebagaimana dikutip *Antara*.

Dikatakan, layanan dengan Kartu BPJS Kesehatan ini untuk mengingatkan kepesertaan gotong-royong yang wajib dan diatur dalam UU No 40 Tahun

2004 dan PP No 86 Tahun 2013. “Jadi semuanya sudah diatur karena mungkin orang salah persepsi aja, dikiranya 1 Maret untuk semua layanan publik,” ucap Ali.

Sebelumnya, Pemerintah memberlakukan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat untuk mengakses berbagai layanan publik melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada 6 Januari 2022.

Pemberlakuan kepesertaan Program JKN itu sebagai syarat untuk mengakses berbagai layanan publik, antara lain meliputi bidang ekonomi, pendidikan, ibadah, serta hukum. Untuk itu, Pemerintah menargetkan 98 persen penduduk menjadi peserta JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. **(San)-d**

REVITALISASI INDUSTRI

Komitmen Penuhi Kebutuhan Gula Masyarakat

JAKARTA (KR) - Pemerintah terus berupaya memenuhi pasokan kebutuhan gula dalam negeri, komitmen ini terus diimplementasikan melalui program revitalisasi industri gula. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat.

“Saya ingin menekankan kembali bahwa komitmen Pemerintah dalam program revitalisasi industri gula tidak pernah surut,” kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) secara daring di Jakarta, Selasa (22/2).

Lebih jauh Wapres menuturkan bahwa Indonesia pernah mengalami era kejayaan industri gula pada tahun 1930-an dengan prestasi tertinggi sebagai negara pengekspor gula. “Sejarah mencatat, negeri kita pernah menjadi pengekspor gula pada tahun 1930-an,” terangnya.

Oleh karena itu, tambah Wapres, untuk dapat kembali meraih kejayaan tersebut, pemerintah terus memperbaiki kondisi dan kualitas pabrik gula agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas yang juga akan berimbas pada kesejahteraan petani.

“Kita ingin mandiri dalam pasokan gula, terma-

suk mendongkrak kesejahteraan petani tebu yang telah berperan di dalamnya,” tegas Wapres.

Wapres pun menilai bahwa Indonesia memiliki lahan yang cukup luas untuk menanam tebu, bahan baku gula. Namun dalam skala besar, luas lahan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan industri.

“Lahan untuk tebu ini banyak di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga NTB. Namun, lahan-lahan yang ada dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan industri gula,” tuturnya.

Di samping itu, lanjut Wapres, ditemukan permasalahan lainnya baik dari sisi produktivitas perkebunan tebu (on farm) maupun pasca panen (off farm). Untuk perbaikan on farm, sambungannya, para petani memerlukan bibit yang unggul, sehingga kualitas dan produksi tebu pun meningkat.

Sementara dari sisi off farm, perlu ada penambahan dan peremajaan pabrik gula. Ada pula aspek lain seperti tata kelola dan iklim usaha yang sangat menentukan keberhasilan industri gula Indonesia. Untuk itu, Wapres berharap agar seluruh tantangan yang dihadapi mendapatkan solusi terbaik dan pada akhirnya akan membawa manfaat bagi semua. **(Sim)-d**

INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU DI YOGYAKARTA

Potensial Jadi Destinasi Wisata

YOGYA (KR) - Festival Tembakau Indonesia di Yogyakarta merupakan hal yang baru. Namun demikian, jika melihat potensi wisata dan keberadaan pabrik pengolahan tembakau yang legendaris di Yogyakarta menjadi petunjuk adanya potensi yang kuat sebagai salah satu destinasi wisata di Yogyakarta.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata DIY LS Don Charles usai Pembukaan Festival Tembakau yang digelar di halaman PT Taru Martani, Selasa (22/2). Don Charles hadir mewakili Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Direktur PT Taru Martani Nur Achmad Affandi dan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bantul Bambang Guritno.

Festival digelar selama 3 hari tersebut, selain menyajikan berbagai produk tembakau dari berbagai produsen, juga menggelar kegiatan unik, seperti lomba melinting tembakau oleh ibu-ibu hingga sarasehan terkait pertembakauan. Festival juga menjadi pertemuan para petani tembakau dengan produsen rokok, sehingga memiliki gambaran terkait pasar tembakau.

Menurut Don Charles, penguatan sebagai daya tarik wisata bisa diangkat melalui *experience* saat mengunjungi festival tembakau atau saat mengunjungi pabrik rokok yang legendaris, seperti pabrik cerutu PT Taru Martani. Wisatawan akan merasakan pengalaman dengan melibatkan dalam produksi, seperti melinting rokok, atau membuat cerutu. Sehingga wisatawan terkesan untuk kemudian membawa produk tersebut sebagai suvenir ke negara asal wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Nur Achmad Affandi mengakui adanya potensi tersebut, seperti disampaikan Don Charles. Saat ini, Taru Martani menjadi perusahaan tertua di Indonesia yang masih berproduksi, terlebih sebagian produksinya diekspor ke sejumlah negara. Dengan lahan yang begitu luas, dapat ditata untuk kemudian menjadi bagian destinasi wisata Yogyakarta.



KR-Istimewa

Peninjauan sejumlah produk tembakau dari berbagai produsen di Festival Tembakau Indonesia.

karta. “Kami sendiri sudah beberapa kali menerima tamu dari mancanegara. Baik kunjungan ke pabrik maupun juga wisata,” ujarnya.

Dari pantauannya, baik terhadap wisatawan asing dan dalam negeri, mereka awalnya tidak mengetahui mengenai sejarah dari perusahaan

milik Pemda DIY. Setelah mengetahui bahwa didirikan pada tahun 1918, maka menarik. Di samping ingin tahu terkait proses produksi dan mendapatkan suvenirnya, juga ingin mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen yang bisa berjalan lebih dari 100 tahun. **(Jon)-d**